

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN BISNIS DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur)

Oleh: Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno^{1*)}

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Model analisa dalam penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda, analisa regresi adalah analisa tentang ketergantungan satu variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen (bebas/penjelas). Berdasarkan Uji Regresi diperoleh hasil analisis baik PAD maupun DAU memiliki koefisien regresi positif, artinya jika ada perubahan positif pada variabel bebas (PAD dan DAU) akan mengakibatkan naik juga nilai belanja daerahnya. Adapun nilai koefisien determinasinya sebesar 88,7 % Nilai koefisien determinasi atau R^2 *Adjusted* sebesar 88,7 % menunjukkan bahwa perubahan belanja modal 88,7% dapat dijelaskan atau ditentukan oleh perubahan variabel bebas PAD dan DAU, sedangkan 11,3% dijelaskan oleh variabel diluar PAD dan DAU. Pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dapat dilihat dari hasil uji F_{hitung} 0,00 yang lebih kecil nilainya dari standar kesalahan yang ditoleransi sebesar $\alpha = 5 \%$

Kata-kata Kunci : PAD, DAU, Belanja Modal.

Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Revenue and General Allocation Funds (DAU) on Regency / City Capital Expenditures in East Java The analysis model in this study uses multiple linear regression analysis, regression analysis is an analysis of the dependence of one dependent variable (bound) on one or more independent variables (free / explanatory). Based on the Regression Test the analysis results obtained both PAD and DAU have a positive regression coefficient, meaning that if there is a positive change in the independent variables (PAD and DAU) will also cause an increase in the value of regional spending. The coefficient of determination is 88.7% The coefficient of determination or R^2 *Adjusted* value of 88.7% indicates that changes in capital expenditure 88.7% can be explained or determined by changes in the independent variables PAD and DAU, while 11.3% is explained by variables outside of PAD and DAU. Significant influence of the independent variables on the dependent variable can be seen from the results of the F_{count} 0.00 test which is smaller than the standard tolerable error of $\alpha = 5\%$*

Keywords: PAD, DAU, Capital Expenditures..

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan penyempurna terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, sedangkan dari segi pembiayaan

keuangan daerah atau perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan

*) Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno adalah dosen Polinema

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Sampai saat ini perjalanan pelaksanaan otonomi daerah dengan konsep desentralisasi yang menitikberatkan pada kemandirian Kabupaten / Kota, dalam kenyataannya masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan yang tidak sedikit dan permasalahan tersebut tentunya antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah sama. Misalnya permasalahan bagi daerah yang memiliki sumber kekayaan daerah yang cukup besar dibandingkan dengan daerah yang kekurangan sumber kekayaan daerah tentunya sangatlah berbeda. Bagi daerah yang memiliki sumber kekayaan besar tentunya dalam menyambut kemandirian atau otonomi daerah dengan sukacita, sementara di daerah yang sumber kekayaan alamnya sedikit justru otonomi daerah akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri.

Berbagai hal yang bermunculan sebagai akibat adanya otonomi daerah sebenarnya bukanlah berarti Otonomi Daerah kurang baik atau lebih jelek dibandingkan sentralisasi, karena sebenarnya dengan Otonomi Daerah justru

nantinya diharapkan masing-masing daerah akan mampu untuk mendanai semua pengeluaran Daerahnya dengan kemampuan dari Daerah itu sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Untuk dapat mewujudkan impian tersebut tentulah Pemerintahan Daerah harus selalu melakukan pembenahan secara terus menerus dari waktu ke waktu agar semangat Otonomi Daerah dapat segera diwujudkan oleh Pemerintahan Daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Melihat peranan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana terlihat dari penjelasan sebelumnya, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan PAD sebagai bahasan dalam penelitian.

Melihat kenyataan tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pendapatan asli daerah yang relatif masih sangat jauh untuk dikatakan dapat memenuhi terhadap pembiayaan atau pengeluaran pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui

pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun berganda Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur

1.1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur khususnya dan Kabupaten/Kota umumnya di Indonesia. Karena melalui penelitian ini akan diketahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal.

2. Kajian Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Asri (2017) dalam penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adyatama (2015) dalam penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

Juniawan (2018) dalam penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.2. Otonomi Daerah

Secara khusus, tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.Desentralisasi

Di Indonesia Desentralisasi keberadaannya telah menjadi konsensus Nasional, keberadaannya sendiri tertuang dalam Undang-undang Dasar dan hampir setiap kabinet yang terbentuk dimasa lalu selalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya. Saat Pemerintahan Orde Baru desentralisasi juga merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian dan bahkan strategi penyelenggaraan desentralisasi selalu tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

2.4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1. ayat 17 yang berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5.Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa struktur APBD

terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

2.6.Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 33 Tahun 2004 pasal 3 menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.7.Belanja Modal

Belanja Modal masuk dalam kategori belanja langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran digunakan dalam rangka untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas

waktu kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.8.Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. (UU No. 33 Tahun 2004)

3. Metodologi Penelitian

3.1.Jenis Penelitian

Penelitian difokuskan pada keuangan Daerah, oleh karena itu dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan untuk diteliti berkaitan dengan APBD.

3.2.Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diambil melalui web.www.djpk.go.id

3.3.Populasi dan Sampling

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dari sampling jenuh artinya semua sampling yang ada dalam populasi diikuti sertakan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah samplinya tidak terlalu besar sehingga

memungkinkan untuk diambil secara keseluruhan.

3.4.Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013 -2017 yang diperoleh dari web.www.djpk.go.id, tanggal 03- 02 - 2019, jam 17:42 PM..

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, artinya untuk mendapatkan data peneliti langsung memperoleh datanya sudah dalam bentuk penyajian data atau data sudah siap untuk dilakukan analisis

3.5.Analisa Data

Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan ko-efisien of determinasi, namun sebelum masuk pada analisa regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik dari data yang tersedia. Adapun datanya merupakan gabungan antara total belanja modal dengan PAD dan DAU. Belanja Modal dalam hal ini sebagai variabel dependen (terikat) sedangkan PAD dan DAU sebagai variabel independen atau bebas.

3.6.Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD dan DAU baik secara parsial maupun berganda terhadap Belanja Modal. Untuk menjawab terhadap hipotesis tersebut, maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut.

Ha : Ada pengaruh signifikan variabel PAD terhadap Belanja Modal

Ha : Ada pengaruh signifikan variabel DAU terhadap Belanja Modal

Ha : Ada pengaruh signifikan variabel PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

4. Hasil Penelitian dan Bahasan

4.1. Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Untuk melihat datanya berdistribusi normal atau tidak bisa menggunakan pendekatan grafik.

Berdasarkan grafik, dapat dinyatakan bahwa data yang dilakukan analisis berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji ini untuk melihat ada tidaknya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas, atau dapat dikatakan antar variabel bebas sebenarnya saling berhubungan atau tidak. Untuk menentukan apakah terjadi multikolonieritas atau tidak dapat dilakukan melalui pendekatan matrik korelasi.

Berdasarkan matriks korelasi tidak terdapat koefisien yang terlalu besar diantara variabel bebasnya, maka hal ini dapat ditengarai tidak terdapat hubungan yang kuat (tidak terdapat multikolonier) diantara variabel bebasnya.

Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas melalui pendekatan Output Scatterplots dapat dinyatakan bahwa model tidak ada masalah dengan heteroskedasitas. Karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol atau disekitar angka nol, titik-titik tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah saja dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola

bergelombang menyebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk melihat apakah gangguan individu ataupun sebuah kelompok berpengaruh terhadap kelompok yang lain pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering muncul pada data runtut waktu atau time series.

Berdasarkan hasil Uji Cochran Orcutt memperoleh nilai 1,933 dengan nilai DW tabel $dL = 1,7413$ dan $dU = 1,7838$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai $d > dU$ dan $d < (4-dU)$.

Uji Signifikansi

Berdasarkan hasil uji signifikansi dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU secara parsial atau secara individu berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat nilai thitung 33,45 dan 6,92 lebih besar dari pada ttabel pada $\alpha = 5\%$ sebesar 1,96. Begitu juga PAD dan DAU secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Fhitung nilai probabilitasnya 0,000 dibawah nilai $\alpha = 5\%$.

Persamaan Regresi

Persamaan garis regresi diperlukan dalam rangka untuk melihat bagaimana persamaan yang ada, serta bagaimana pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat jika yang lain tidak mengalami perubahan atau tetap. Berdasarkan uji statistik maka nilai persamaan regresinya adalah :

$$Y = 55.998,66 + 0,5198X_1 + 0,2025X_2$$

4.2.Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji penelitan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pembahasan hasil penelitian antara lain :

- **Uji Asumsi Klasik** dimana data yang dipergunakan telah lolos uji asumsi klasik, sehingga layak dianalisa lebih lanjut.

- **Persamaan Garis Regresi**

Berdasarkan persamaan garis regresi diatas, dapat dikatakan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini didukung dari hasil uji Fhitung menunjukkan hasil yang signifikan dimana nilai hasil uji probabilitasnya 0,0000 jauh dibawah nilai signifikansi 5%

- **Uji Pengaruh atau Peranan**

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dinyatakan bahwa peranan variabel PAD dan DAU secara bersama-sama terhadap belanja daerah besar dan signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai Uji R2 sebesar 0.9802, artinya pengaruh PAD dan DAU secara bersama-sama diyakini sebesar 98,02%, sedangkan sisanya 1,98% ditentukan variabel dari luar PAD dan DAU. Adapun uji signifikan hasil uji Prob. Fhitung sebesar 0,000 lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan sebesar $\alpha = 5\%$ ini berarti pengaruh variabel penentu besaran nilai PAD dan DAU secara bersama-sama sangat signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu. Asri (2017) dalam penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana

Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menggali Potensi PAD. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam rangka dapat mewujudkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut.

- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- Melakukan pendekatan pada para investor agar mau menanamkan modalnya dalam rangka untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah

- Menggali Kekayaan daerah yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan secara optimal

5. Simpulan dan Saran

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 4 sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh cukup besar yakni sebesar 97,71%. Artinya nilai belanja daerah 97,71% dipengaruhi oleh PAD dan DAU, sedangkan sisanya 2,29% ditentukan oleh variabel diluar PAD dan DAU.

- Hasil uji signifikan menunjukkan secara bersama-sama besaran nilai PAD dan DAU

berpengaruh signifikan, hal ini bisa dilihat dari (Fhitung) memiliki nilai probabilitas kurang dari batasan level signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan pengaruhnya signifikan.

- Secara parsial PAD dan DAU juga berpengaruh signifikan, hal ini bisa dilihat dari hasil uji thitung nilai x_1 3,26 dan nilai x_2 21,75 lebih besar dari nilai t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ dengan df 19 yang nilainya sebesar 1,721

5.2.Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan.

- Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus dapat menumbuh kembangkan iklim investasi agar lebih mempunyai daya tarik bagi calon investor. Karena dengan meningkatnya investasi akan dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah maupun retribusi daerah, mengingat pajak daerah dan retribusi merupakan faktor penentu besaran nilai PAD.
- Perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD agar BUMD yang ada dapat diberdayakan secara maksimum. Mengingat BUMD juga merupakan faktor penting dalam ikut serta meningkatkan PAD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

- Peningkatan sumber pendapatan daerah dapat diupayakan dengan mengoptimalkan yang sudah ada atau justru mencari terobosan yang baru seperti menggali atau mencari Sumber Daya Alam yang baru atau bahkan keunggulan budaya yang kiranya diharapkan dapat menarik para wisatawan domestik atau jika memungkinkan wisatawan manca negara.

6. Daftar Rujukan

- Adyatama.2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Ssebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2015, Hlm: 190 – 205 Vol. 4, No. 2 ISSN :1979-4878.
- Asri Raini at all 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. *Proceeding of Management* : Vol.4, No.2 Agustus 2017 | Page 1685
- Juniawan 2018 Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*